

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Kepala BPKAD Kab. Mojokerto
Dari : Sekretaris BPKAD
Tanggal : 8 Juli 2026
Nomor : 900/ 162 /416-203.1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyusunan Laporan Inovasi Daerah di BPKAD Kab. Mojokerto**

Bahwa Dalam era transformasi digital pemerintahan, kebutuhan akan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi koordinasi internal serta kualitas pelayanan publik menjadi sangat krusial di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa kebutuhan utama yang saling berkaitan Pengelolaan agenda kegiatan dan disposisi pimpinan yang masih berpotensi tidak terpusat dan kurang terdistribusi secara real-time Pelayanan publik dan pengumpulan data kepuasan masyarakat yang membutuhkan sistem digital yang responsif dan terintegrasi Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perlu dikembangkan sistem Aplikasi yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, inovasi merupakan hal yang mutlak harus dibangun dan dikembangkan untuk kemajuan sebuah organisasi agar terus berubah untuk menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya tidak terkecuali dengan organisasi pemerintah. Pembangunan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk terwujudnya good government. Pelaksanaan dan penerapan Inovasi di lembaga pemerintahan dimulai dari kreativitas setiap personil, kelompok dan selanjutnya akan meningkat menjadi inovasi organisasional disetiap levelnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif dan kreatif.

Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam regulasi tersebut sudah tentu perlu diperkuat dengan langkah dan kebijakan strategis agar Inovasi tidak terjebak pada slogan atau semboyan akan tetapi sudah benar-benar menjadi kebutuhan nyata untuk dilaksanakan. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping berbentuk pelayanan publik juga tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik sebagai cerminan dari reformasi birokrasi, sudah menjadi harapan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Karena Inovasi akan mampu menghadirkan birokrasi yang kita harapkan diantaranya adalah memiliki kinerja yang bagus dengan perilaku aparaturnya yang berintegritas, profesional, dinamis, responsif, dan inovatif.

Beberapa sistem aplikasi yang telah kami kembangkan, dapat kami laporkan beberapa Sistem Aplikasi secara yaitu :

1. Aplikasi CARAKA (Catatan Ragam Kegiatan dan Agenda)
2. PRISMA (Pelayanan Registrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat)
3. APLIKASI KEBOANABRANG (Aplikasi Komponen Belanja Online Dan Standart Harga Barang)
4. APLIKASI PURNADI (Pelayanan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Digital)
5. APLIKASI TEKEN (Tanda Tangan Elektronik Dokumen Keuangan)
6. Aplikasi PUTRIDARA (Pencatatan Utilitas dan Entri Data Barang Persediaan Daerah)

Selanjutnya secara lengkap kami lampirkan profil inovasi yang memuat maksud dan tujuan serta tahapan, bentuk, klasifikasi dan kerangka bangun atas Inovasi tersebut.

Demikian menjadikan periksa dan selanjutnya mohon keputusan.

**SEKRETARIS BPKAD
KABUPATEN MOJOKERTO**



ACH. MUSONNIFIN, S.Sos.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196811071989101001

TEMBUSAN :

Yth. Sdr/i Kepala Bidang di BPKAD



Nomor : EST/20020/01/2025
Perihal : Jasa Pembuatan Aplikasi Purnadi (Pelayanan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Digital)

Kepada
Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Yth.

LATAR BELAKANG

Dalam era transformasi digital pemerintahan, kebutuhan akan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi koordinasi internal serta kualitas pelayanan publik menjadi sangat krusial.

Di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Mojokerto, terdapat dua kebutuhan utama yang saling berkaitan:

- Pengelolaan agenda kegiatan dan disposisi pimpinan yang masih berpotensi tidak terpusat dan kurang terdistribusi secara real-time
- Pelayanan publik dan pengumpulan data kepuasan masyarakat yang membutuhkan sistem digital yang responsif dan terintegrasi

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan dua sistem:

CARAKA (Catatan Ragam Kegiatan dan Agenda)

Sistem yang berfungsi untuk mengelola agenda kegiatan, disposisi, serta distribusi informasi secara otomatis kepada pihak terkait.

PRISMA (Pelayanan Registrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat)

Sistem pelayanan digital yang digunakan untuk registrasi tamu/pemohon serta pengumpulan data kebutuhan dan kepuasan masyarakat secara terstruktur.

Kedua aplikasi ini dirancang untuk saling terintegrasi dalam satu ekosistem digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berbasis data.





TUJUAN

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan agenda dan kegiatan pemerintahan
- Mengoptimalkan distribusi informasi kegiatan secara real-time
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital
- Menyediakan data terstruktur untuk analisis dan pengambilan keputusan
- Mendorong integrasi sistem internal dan pelayanan eksternal

FITUR UTAMA

A. APLIKASI CARAKA

1. Kalender Agenda Terintegrasi
 - Tampilan kalender kegiatan berbasis harian, mingguan, dan bulanan
 - Integrasi agenda lintas OPD
2. Manajemen Agenda dan Kegiatan
 - Input, edit, dan penghapusan agenda
 - Detail kegiatan (waktu, lokasi, deskripsi)
3. Fitur Disposisi
 - Penunjukan penanggung jawab kegiatan (multi-user)
 - Monitoring keterlibatan pejabat/pegawai
4. Dashboard Agenda Harian
 - Menampilkan agenda harian secara real-time
 - Cocok untuk monitoring pimpinan dan display publik
5. Integrasi WhatsApp Otomatis
 - Notifikasi agenda secara otomatis kepada pihak terkait
 - Distribusi informasi berbasis link (real-time access)
6. Integrasi dengan E-Office
 - Sinkronisasi data agenda tanpa input ulang
 - Mengurangi duplikasi pekerjaan



B. APLIKASI PRISMA

1. Registrasi Digital Pengunjung
 - Input data pengunjung berbasis nomor handphone
 - Identifikasi kebutuhan layanan secara cepat
2. Sistem Interaktif (Chat-Based Interface)
 - Alur pengisian data berbasis percakapan
 - User-friendly dan mudah digunakan
3. Pendataan Kebutuhan Layanan
 - Informasi tujuan kunjungan
 - Data pihak yang akan ditemui
4. Pengumpulan Data Kepuasan Masyarakat
 - Survey pengalaman pelayanan
 - Data untuk evaluasi kinerja instansi

MANFAAT IMPLEMENTASI

A. Bagi Instansi

- Koordinasi kegiatan lebih terstruktur dan terpusat
- Efisiensi waktu dan pengurangan pekerjaan manual
- Monitoring aktivitas pimpinan secara real-time

B. Bagi Pegawai

- Informasi agenda diterima secara otomatis
- Mengurangi risiko miss komunikasi
- Akses informasi kapan saja

C. Bagi Masyarakat

- Pelayanan lebih cepat dan terarah
- Pengalaman layanan lebih baik
- Kanal komunikasi yang lebih modern



JADWAL Pengerjaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 6 januari 2025 s/d 28 Februari 2025

No	Tahapan Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem								
2	Pengembangan CARAKA								
3	Pengembangan PRISMA								
4	Integrasi Sistem								
5	Pengujian Sistem								
6	Implementasi & Pelatihan								
7	Finalisasi dan Penyerahan Sistem								



MITRA CIPTA
INFORMATIKA



mitraciptainformatika.com



halo@mitraciptainformatika.com



0897-3333-135

PENUTUP

Aplikasi CARAKA dan PRISMA merupakan inovasi digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Dengan mengintegrasikan manajemen agenda dan pelayanan masyarakat dalam satu ekosistem, sistem ini diharapkan mampu:

- Meningkatkan efektivitas kerja organisasi
- Mempercepat alur komunikasi dan koordinasi
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

Demikian proposal ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah.



MIFTAKHUL ULUM SYAIFULLOH
Direktur



**MITRA CIPTA
INFORMATIKA**



mitraciptainformatika.com



halo@mitraciptainformatika.com



0897-3333-135

PROPOSAL APLIKASI KEBOANABRANG (APLIKASI KOMPONEN BELANJA ONLINE DAN STANDART HARGA BARANG)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto
2025



I. Latar Belakang

Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Mojokerto, menghadapi tantangan dalam menentukan harga barang yang akan digunakan dalam perencanaan anggaran daerah (APBD). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan standar harga barang yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja. Proses ini memerlukan verifikasi yang melibatkan TIM dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan harga yang diajukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Saat ini, proses pengusulan harga barang dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis aplikasi yang dapat memfasilitasi proses pengusulan harga barang, verifikasi oleh TIM BPKAD, dan ekspor data ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri secara efisien dan akurat.

Aplikasi **Keboanabrang** hadir sebagai solusi dalam menangani masalah tersebut. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan platform berbasis web yang memungkinkan OPD Kabupaten Mojokerto untuk mengusulkan harga barang yang akan digunakan dalam perencanaan anggaran, serta melakukan verifikasi dan ekspor data ke SIPD.

I. Tujuan

- Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengusulan harga barang oleh OPD.
- Mempermudah proses verifikasi harga barang oleh TIM BPKAD Kabupaten Mojokerto.
- Menyediakan sistem yang dapat mengintegrasikan data harga barang ke dalam aplikasi SIPD milik Kementerian Dalam Negeri secara otomatis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

II. Modul Aplikasi Keboanabrang

Aplikasi Keboanabrang terdiri dari beberapa modul utama yang akan memfasilitasi seluruh proses dari pengusulan hingga verifikasi dan ekspor data ke SIPD.



1. **Modul Pengusulan Harga Barang**

- Fitur untuk OPD mengusulkan harga barang yang akan digunakan dalam perencanaan anggaran.
- Fitur untuk memasukkan rincian barang, seperti nama barang, kode barang, satuan, dan harga yang diusulkan.
- Sistem otomatis untuk memberikan rekomendasi harga berdasarkan data harga barang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. **Modul Verifikasi oleh BPKAD**

- Fitur untuk TIM BPKAD melakukan verifikasi terhadap harga barang yang diusulkan oleh OPD.
- Fitur untuk menyetujui atau menolak harga barang yang diajukan, beserta alasan dan catatan.
- Sistem untuk melacak status verifikasi setiap barang yang diusulkan.

3. **Modul Pengelolaan Data Harga Barang**

- Fitur untuk mengelola dan memperbarui data harga barang secara periodik.
- Fitur untuk mengakses dan melihat riwayat harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui.

4. **Modul Ekspor ke SIPD**

- Fitur untuk mengekspor data harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui ke aplikasi SIPD milik Kementerian Dalam Negeri.
- Sistem untuk memastikan data yang diekspor sesuai dengan format yang diterima oleh SIPD.

5. **Modul Laporan dan Statistik**

- Fitur untuk menghasilkan laporan terkait harga barang yang telah diusulkan, diverifikasi, dan disetujui.
- Fitur untuk menampilkan statistik pengusulan harga barang berdasarkan OPD, kategori barang, dan status verifikasi.

III. **Jadwal Pengerjaan Aplikasi**

Berikut adalah jadwal pengerjaan aplikasi Keboanabrang yang terbagi dalam beberapa tahapan:

No.	Tahapan Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1	Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem	6 Januari - 12 Januari 2025
2	Pengembangan Modul Pengusulan Harga Barang	13 Januari - 26 Januari 2025
3	Pengembangan Modul Verifikasi oleh BPKAD	27 Januari - 9 Februari 2025



4	Pengembangan Modul Ekspor ke SIPD	10 Februari - 16 Februari 2025
5	Pengembangan Modul Pengelolaan Data Harga Barang	17 Februari - 23 Februari 2025
6	Pengembangan Modul Laporan dan Statistik	24 Februari - 2 Maret 2025
7	Pengujian dan Uji Coba Sistem	3 Maret - 16 Maret 2025
8	Finalisasi dan Penyerahan Sistem	17 Maret - 31 Maret 2025

IV. Penutup

Aplikasi **Keboanabrang** diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi OPD Kabupaten Mojokerto dalam mengusulkan harga barang yang digunakan dalam perencanaan penganggaran daerah. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengusulan harga, verifikasi, dan integrasi ke dalam sistem SIPD akan berjalan lebih transparan, akurat, dan cepat, serta mendukung penyusunan anggaran yang lebih baik dan terkontrol. Kami berharap aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat proses pelayanan publik.

Demikian proposal pembuatan aplikasi Keboanabrang ini kami buat, semoga dapat menjadi acuan untuk pengembangan sistem yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Hormat Kami



Miftakhul Ulum Syaifulloh

Direktur



**MITRA CIPTA
INFORMATIKA**

**PROPOSAL
APLIKASI PURNADI
(PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYAYAN DIGITAL)**

Nomor : EST/20022/05/2025



Nomor : EST/20022/05/2025
Perihal : Jasa Pembuatan Aplikasi Purnadi (Pelayanan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Digital)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah
Kabupaten Mojokerto

LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Mojokerto, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu proses administratif yang krusial adalah penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai.

Saat ini, proses pengajuan dan penerbitan SKPP seringkali masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Proses administrasi yang memakan waktu karena dilakukan secara manual atau semi-digital
- Tingginya potensi kesalahan input data
- Kurangnya transparansi dalam proses verifikasi
- Keterbatasan monitoring status pengajuan oleh OPD

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan Aplikasi PURNADI (Pelayanan SKPP Digital) sebagai solusi terintegrasi untuk memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan SKPP secara elektronik.

Aplikasi ini memungkinkan OPD mengajukan SKPP secara daring, memantau status secara real-time, serta meningkatkan efektivitas koordinasi dengan BPKAD.



TUJUAN

Adapun tujuan pengembangan Aplikasi PURNADI adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi proses pengajuan dan penerbitan SKPP
- Meminimalisir kesalahan data melalui sistem terstruktur
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan administrasi kepegawaian
- Mempermudah monitoring status pengajuan secara real-time
- Mendukung transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah

FITUR UTAMA

Aplikasi PURNADI dirancang dengan fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. Fitur Pengajuan SKPP (OPD)

- Pengajuan SKPP secara online untuk berbagai jenis:
 - Pensiun
 - Mutasi/Pindah
 - Meninggal
 - Keuzuran Jasmani
 - PPPK
- Input data lengkap pegawai, penghasilan, potongan, dan tanggungan
- Upload dokumen pendukung (SK, KK, dll)
- Penyimpanan draft sebelum diajukan

2. Fitur Manajemen Data SKPP

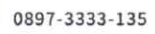
- Edit dan koreksi data sebelum pengajuan
- Penghapusan data yang belum diajukan
- Validasi kelengkapan data secara sistem

3. Fitur Pengajuan & Tracking Status

- Pengajuan SKPP ke BPKAD secara digital
- Tracking status pengajuan secara real-time



- Notifikasi otomatis (termasuk WhatsApp)
- 4. Fitur Verifikasi oleh BPKAD
 - Dashboard monitoring seluruh pengajuan
 - Validasi detail data dan dokumen
 - Opsi:
 - Persetujuan
 - Penolakan (dengan alasan)
 - Riwayat proses verifikasi terdokumentasi
- 5. Fitur Komunikasi Terintegrasi
 - Chat langsung antara OPD dan BPKAD
 - Klarifikasi data tanpa keluar sistem
 - Notifikasi otomatis ke pengguna
- 6. Fitur Generate & Unduh Dokumen
 - Generate dokumen SKPP otomatis
 - Download SKPP setelah disetujui
 - Dokumen siap cetak dan legalisasi
- 7. Fitur Manajemen Administrator
 - Pengelolaan data OPD
 - Pengelolaan pengguna (user management)
 - Pengaturan data pejabat penandatanganan
 - Monitoring statistik pengajuan



No	Tahapan Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem									
2	Pengembangan Modul Pengajuan SKPP									
3	Pengembangan Modul Verifikasi									
4	Pengembangan Modul Notifikasi & Komunikasi									
5	Pengembangan Modul Dokumen & Unduh									
6	Pengujian & Uji Coba Sistem									
7	Implementasi & Pelatihan									
8	Finalisasi dan Penyerahan Sistem									



PENUTUP

Aplikasi PURNADI merupakan langkah strategis dalam mendorong digitalisasi layanan administrasi kepegawaian, khususnya dalam proses penerbitan SKPP. Dengan sistem ini, proses yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu dapat disederhanakan menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.

Implementasi PURNADI diharapkan mampu:

- Meningkatkan kualitas layanan publik
- Mempercepat proses administrasi kepegawaian
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan implementasi sistem.


MITRA CIPTA
INFORMATIKA
MIFTAKHUL ULUM SYAIFULLOH
Direktur



MITRA CIPTA
INFORMATIKA

**PROPOSAL
APLIKASI TEKEN
(TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DOKUMEN KEUANGAN)**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto
2025



DESKRIPSI

Aplikasi TTE-DPA adalah sebuah sistem digital berbasis web dan mobile yang dirancang untuk mendukung proses penyusunan, validasi, dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada Pemerintah Daerah. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan percepatan birokrasi, transparansi anggaran, serta kepatuhan pada kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Dengan TTE-DPA, setiap dokumen yang sebelumnya membutuhkan tanda tangan basah dan proses manual lintas meja dapat diproses secara digital dengan alur tanda tangan berjenjang, mulai dari Kepala OPD hingga Sekretaris Daerah. Proses ini tidak hanya memotong waktu birokrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Karakteristik Utama Aplikasi

a) Alur Persetujuan Berjenjang

Dokumen hanya dapat diteruskan ke pejabat berikutnya setelah tanda tangan dari pejabat sebelumnya selesai. Rantai persetujuan mengikuti urutan resmi:

Kepala OPD → Koordinator OPD BPKAD → Tim Kecil BPKAD → TAPD → PPKD & Sekda.

b) Legalitas & Kepatuhan Regulasi

Aplikasi menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai standar BSRé – Kominfo serta mendukung regulasi UU ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan Perpres 95/2018 tentang SPBE.

c) Keamanan Data

Dokumen ditandatangani menggunakan teknologi Public Key Infrastructure (PKI) dengan enkripsi end-to-end, memastikan integritas dan otentikasi tanpa celah manipulasi.

d) Efisiensi & Paperless

Semua proses tanda tangan berlangsung digital, mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan logistik, serta meminimalisasi risiko kehilangan dokumen.

e) Transparansi & Audit Trail

Sistem mencatat seluruh aktivitas: siapa menandatangani, kapan, dan dari perangkat apa. Audit trail ini menjadi bukti kuat dalam pengawasan internal maupun eksternal (BPK, Inspektorat, atau auditor independen).



f) Integrasi Sistem Keuangan Daerah

TTE-DPA dapat diintegrasikan dengan SIPD atau aplikasi pengelolaan keuangan lain yang sudah ada di Pemda, sehingga mengurangi redundansi data.

SPESIFIKASI

1. Manajemen Dokumen

Aplikasi TTE-DPA dilengkapi dengan modul manajemen dokumen yang memungkinkan setiap OPD mengunggah, menyimpan, dan mengelola dokumen DPA/DPPA secara digital dengan lebih terstruktur. Setiap dokumen yang diunggah akan otomatis diberikan nomor unik untuk memudahkan pelacakan serta disimpan dalam arsip elektronik yang aman. Sistem juga mendukung versioning, sehingga setiap revisi dokumen dapat terdokumentasi dengan baik tanpa menghapus versi sebelumnya, menjaga transparansi proses perencanaan anggaran. Selain itu, fitur pencarian cepat dan filter dokumen berdasarkan nomor, SKPD, atau tahun anggaran mempermudah pengguna menemukan arsip yang dibutuhkan. Dengan adanya manajemen dokumen digital ini, risiko dokumen hilang, tercecer, atau terjadi duplikasi dapat diminimalisasi, sekaligus mendukung program paperless government yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2. Workflow Tanda Tangan Berurutan

Penerapan workflow tanda tangan berurutan yang terintegrasi dengan alur birokrasi resmi pemerintah daerah. Setiap dokumen yang masuk ke sistem harus melewati proses penandatanganan sesuai hierarki jabatan, dimulai dari Kepala OPD selaku penanggung jawab utama, dilanjutkan ke Koordinator OPD dari BPKAD, kemudian diverifikasi oleh Tim Kecil BPKAD, diteruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terakhir dilakukan pengesahan oleh PPKD serta Sekretaris Daerah. Mekanisme ini bersifat gatekeeping, sehingga tidak ada tahap yang bisa dilewati atau dimanipulasi. Proses berjenjang ini memastikan setiap dokumen telah melalui review administratif, teknis, dan substantif sebelum mencapai tahap final. Selain menjamin kepatuhan terhadap prosedur resmi, sistem ini juga memberikan transparansi penuh dengan jejak audit yang jelas, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rawan kesalahan.

3. Digital Signature PKI-Based

Aplikasi TTE-DPA mengadopsi teknologi tanda tangan elektronik berbasis Public Key Infrastructure (PKI) yang sudah diakui secara hukum di Indonesia melalui penyelenggara resmi seperti BSR E Kominfo. Dengan mekanisme ini, setiap dokumen yang ditandatangani akan diproteksi menggunakan sertifikat digital sah yang melekat pada identitas pejabat berwenang. Proses penandatanganan dilakukan dengan cara menghasilkan hash dokumen menggunakan algoritma kriptografi SHA-256, kemudian dienkripsi dengan private key



milik pejabat bersangkutan. Hasilnya adalah tanda tangan elektronik yang unik, otentik, dan tidak dapat dipalsukan. Selain itu, sistem juga menambahkan QR Code dan metadata digital yang dapat diverifikasi publik untuk memastikan keaslian dokumen. Dengan pendekatan ini, aplikasi tidak hanya menggantikan tanda tangan manual, tetapi juga meningkatkan tingkat keamanan, integritas, dan keabsahan dokumen DPA/DPPA sesuai standar nasional maupun internasional.

4. Audit Trail

Fitur audit trail pada aplikasi TTE-DPA berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang merekam setiap aktivitas yang terjadi sepanjang siklus hidup dokumen. Setiap tindakan mulai dari pengunggahan, revisi, hingga penandatanganan dicatat secara detail, mencakup nama pejabat, jabatan, waktu, lokasi, serta perangkat yang digunakan. Seluruh catatan disimpan dalam format yang bersifat immutable sehingga tidak dapat dihapus atau diubah, memberikan jaminan integritas data yang kuat. Laporan audit ini dapat diakses sewaktu-waktu oleh administrator maupun auditor internal, bahkan dapat diekspor dalam bentuk PDF atau Excel untuk keperluan pemeriksaan oleh Inspektorat, BPK, atau lembaga pengawas lainnya. Dengan adanya audit trail, aplikasi tidak hanya memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi potensi kecurangan, mempercepat proses audit, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5. Notifikasi Otomatis

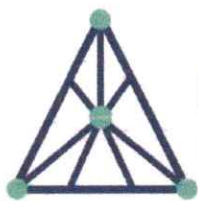
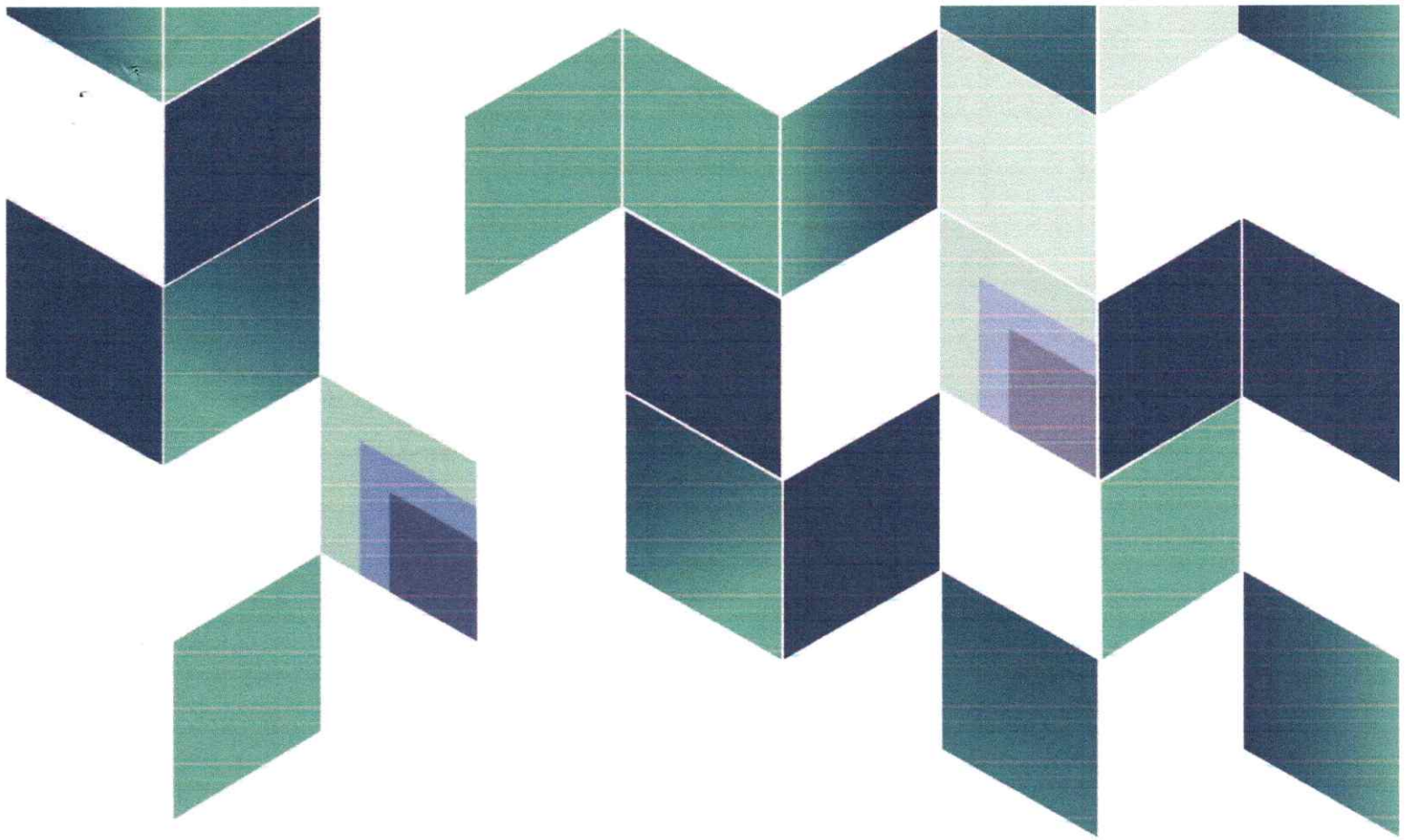
Aplikasi TTE-DPA dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis yang dirancang untuk memastikan setiap pejabat mengetahui giliran penandatanganan tanpa harus menunggu instruksi manual. Begitu sebuah dokumen mencapai tahap tertentu dalam workflow, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat melalui WhatsApp Business API. Notifikasi ini berisi informasi ringkas mengenai dokumen, status proses, serta tautan langsung untuk membuka dan menandatangani dokumen secara digital. Apabila dalam jangka waktu tertentu belum ada tindakan dari pejabat terkait, sistem akan mengirimkan reminder ulang hingga dokumen diproses. Dengan mekanisme ini, potensi keterlambatan akibat kelalaian atau menumpuknya dokumen dapat diminimalisasi. Fitur notifikasi otomatis tidak hanya meningkatkan kecepatan proses, tetapi juga memperkuat disiplin birokrasi digital dengan tetap menghormati hierarki dan prosedur resmi.

6. Dashboard Monitoring

Fitur dashboard monitoring pada aplikasi TTE-DPA berfungsi sebagai pusat kendali yang menampilkan status dokumen secara real-time dan komprehensif. Melalui tampilan visual yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah melihat posisi setiap dokumen apakah masih tertunda, sedang dalam proses tanda tangan, atau sudah selesai disahkan. Dashboard ini juga dilengkapi dengan filter dan pencarian cerdas berdasarkan SKPD,

Mitratama Utama Syarifuddin

Direktur



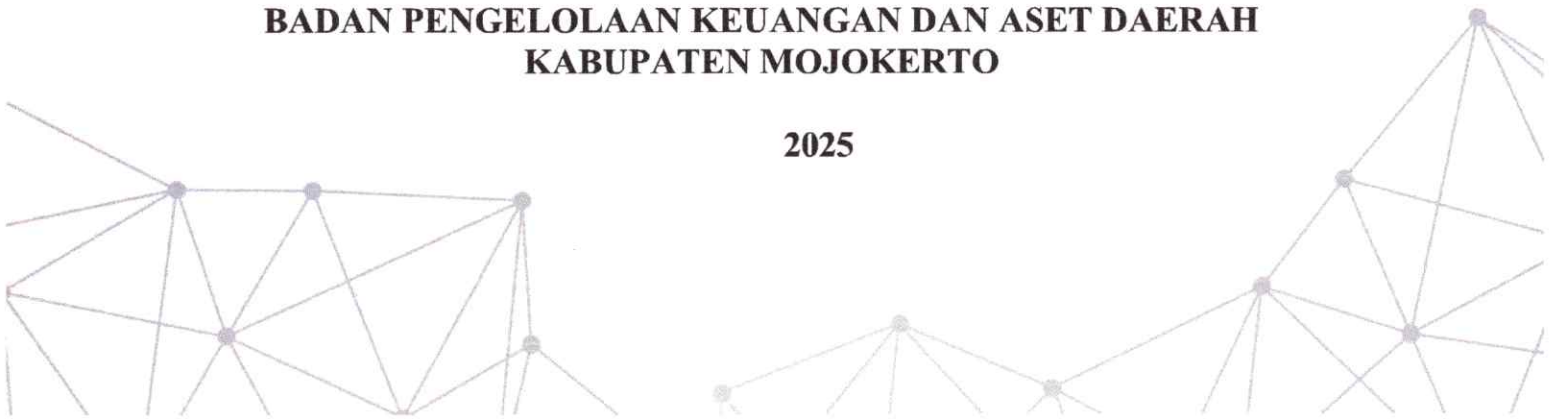
CV. TIM
Teknologi Indonesia Maju

KOMPOSISI TIM & JADWAL PELAKSANAAN

**MAINTENANCE DAN UPDATE APLIKASI PUTRIDARA
BERBASIS WEBSITE**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

2025





CV. Teknologi Indonesia Maju
Penerapan Teknologi Informasi (Software & Hardware)
JL. Medokan Asri Barat 3 MA.1/C-7, RT. 001/005 Kec.
Rungkut, Kel Medokan Ayu, Kota Surabaya.

JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan : Maintenance dan Update Aplikasi PUTRIDARA
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun : 2025

Pekerjaan ini akan dilaksanakan mulai tanggal **06 Agustus 2025 s.d 05 Oktober 2025**, sesuai dengan kesepakatan & kontrak yang disepekat bersama, dengan timelina sebagai berikut :

NO.	AKTIVITAS	AGUSTUS			SEPTEMBER				OKTOBER
		II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Pengurusan Dokumen Pendahuluan								
2	Konsultasi Dan Pengumpulan Data								
3	Analisis Dan Pemetaan Data								
4	Penyesuaian Database								
5	Penyesuaian Frondend Aplikasi								
6	Penyesuaian Backend								
7	Uji Coba Awal								
8	Penyempurnaan Dan Perbaikan Bug (Jika Ada)								
9	Uji Coba Akhir								
10	Import Database & Source Code								



CV. Teknologi Indonesia Maju Telp : 081232089947,
Email : cvteknologiindonesiamaju@gmail.com



CV. Teknologi Indonesia Maju
Penerapan Teknologi Informasi (Software & Hardware)
JL. Medokan Asri Barat 3 MA.1/C-7, RT. 001/005 Kec.
Rungkut, Kel Medokan Ayu, Kota Surabaya.

DAFTAR PERSONIL INTI

Pekerjaan : Maintenance dan Update Aplikasi PUTRIDARA
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun : 2025

Berikut daftar personil inti pada kegiatan :

No	Nama	Posisi	Kualifikasi	Bulan
I.	Tenaga Ahli			
1.	Mochammad Hamdi Ramadhan,S.Kom	Leader Programer	S1 - 6th	2
2.	Saleh Abdullah Attamimi,S.Kom	Programer	S1 - 5th	2
3.	Moch. Faiz Roichan, S.Kom	Programer	S1 - 5th	2



CV. Teknologi Indonesia Maju Telp : 081232089947,
Email : cvtknologiindonesiamaju@gmail.com